



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, berkat karunia serta Ridho-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 telah dapat tersusun. Penyusunan dokumen Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 ini merupakan gambaran yang akan dijadikan pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam menjalankan program kerja selama 1 (satu) tahun, sehingga apa yang direncanakan dapat terwujud.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan dokumen Renja ini serta besar harapan kami semoga Dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun rangkaian pekerjaan selanjutnya. Semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kami sehingga tersusunnya Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025.

Padang Panjang, Juni 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG**



BENNY SSTP
Pembina Tk II/ NIP. 19840402 20021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan I	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	17
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	21
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi	21
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	26
3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan	27
BAB IV PENUTUP	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Renja-PD merupakan acuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam pembangunan daerah dan merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) OPD. Renja-PD Perubahan memuat hasil evaluasi Renja tahun berkenaan sampai dengan Triwulan I, dan memuat tujuan dan sasaran Renja-PD serta program dan kegiatan perubahan pada tahun berkenaan.

Dengan demikian Renja-PD Perubahan pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra dan merupakan salah satu dari komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja-PD Perubahan dalam tahun berkenaan dilakukan pengukuran kinerja triwulan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-PD sebagaimana diamanatkan dalam pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Renja-PD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berkenaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi : (a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan RKPD dan/atau (b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berkenaan, maka disusunlah Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 ini didasarkan atas hasil

evaluasi Renja-PD pada Triwulan I yang meliputi evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dan menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi terkait pelaksanaan program/kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6923);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
 13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
 14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);
 16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 2);
 17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

18. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Negara Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 9);
19. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 10).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam tahun berkenaan, guna menyikapi perkembangan keadaan yang yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan RKPD sesuai dengan Renja sebelumnya.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah guna mengarahkan kembali seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun anggaran 2025 dapat terencana dan berkenaan dengan baik sesuai dengan perkembangan keadaan yang terjadi, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mencapai sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berkenaan sampai dengan Triwulan I dengan menjelaskan penyebab program/kegiatan/subkegiatan yang tidak mencapai target dan melebihi target serta faktor penghambat dan faktor pendorong.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional/provinsi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, kegiatan dan sub kegiatan.

Bab IV Penutup

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh OPD dan permasalahan permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan pada tahun yang akan datang.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tahun berkenaan adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi pada tahun 2025.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan.

Kualitas Renja-PD yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, dikaitkan dengan pencapaian Renstra-PD. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Secara umum pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sudah disusun berdasarkan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan keuangan daerah. Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tahun anggaran 2025 terdiri dari 3 (Tiga) program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 19 (Sembilan belas) sub kegiatan.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapai/terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Pengukuran akuntabilitas mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Program Kegiatan.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang pada periode Renstra Tahun 2025 -2029 memiliki 3 sasaran strategis, dengan capaian kinerja secara umum baik, dengan capaian kinerja 100%.

Secara keseluruhan capaian indikator kinerja ini dapat tercapai dengan beberapa langkah yang dilaksanakan:

1. Pelaksanaan operasi tim gabungan Penegakkan Perda berupa tim SK4 yang melibatkan unsur TNI Polri dan instansi vertikal lainnya
2. Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Pemberantasan Penyakit Masyarakat yang diikuti oleh tokoh masyarakat dan pelajar
3. Perekrutan tenaga harian lepas (THL) untuk Banpol PP dan Petugas Pemadam Kebakaran yang membantu dalam pelaksanaan operasional lapangan
4. Kesiapsiagaan dari anggota operasional pemadam kebakaran dalam pelaksanaan tugas

Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang Tahun bekenaan 2025 meliputi indikator program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian Program/Kegiatan dan realisasi pelaksanaan. Untuk mengetahui pelaksanaan Renja tahun 2025 berjalan maka dilakukan pengukuran dan evaluasi Renja dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2025 yang tergambar dalam Tabel 2.1. berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakakaran Kota Padang Panjang

SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA S/D RENJA TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2025 YANG DIEVALUASI)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DI EVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=5+7		9	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			29.364.777.780		11.932.322.299		11.973.657.998		2.606.147.309		14.538.469.608		49,51%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100 Persen	15.729.618.580	100 Persen	6.595.194.649	100%	6.841.281.698	35%	1.690.653.509	100 Persen	8.285.848.158	100 Persen	52,68%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	90 Persen	13.165.485.990	82 Persen	5.654.678.751	90%	5.333.431.498	35%	1.564.864.772	82 Persen	7.219.543.523	82 Persen	54,84%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1722 Orang/bulan	13.165.485.990	688 Orang/bulan	5.654.678.751	574 Orang/bulan	5.333.431.498	242 Orang/bulan	1.564.864.772	930 Orang/bulan	7.219.543.523	930 Orang/bulan	54,84%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	60.000.000	100 Persen	98.685.000	100%	-	-	-	100 Persen	98.685.000	100 Persen	164,48%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	60.000.000	221 Paket	98.685.000	174 Paket	-	-	-	221 Paket	98.685.000	221 Paket	164,48%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90 Persen	570.819.950	88 Persen	238.345.864	90%	242.195.200	30%	40.008.762	88 Persen	278.354.626	88 Persen	48,76%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	10.069.950	4 paket	2.968.400	4 paket	3.162.000	1 paket	315.900	5 paket	3.284.300	5 paket	32,61%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	120.000.000	4 paket	16.748.500	12 paket	23.966.700	1 paket	2.622.000	5 paket	19.370.500	5 paket	16,14%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36 paket	40.000.000	5 paket	11.110.300	5 paket	15.079.500	1 paket	2.436.100	6 paket	13.546.400	6 paket	33,87%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 laporan	400.750.000	62 laporan	207.518.664	15 laporan	199.987.000	16 laporan	34.634.762	78 laporan	242.153.426	78 laporan	60,43%

SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA S/D RENJA TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2025 YANG DIEVALUASI)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DI EVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah	90%	110.000.000	-	-	90%	Rp141.872.600	-	Rp -	-	-		0,00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	9 unit	110.000.000	-	-	2 unit	141.872.600	-	-	-	-		0,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 Persen	324.640.240	90 Persen	120.838.284	90%	132.432.000	30%	24.415.475	90 Persen	145.253.759	90 Persen	44,74%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	16.000.000	7 Laporan	2.950.000	12 Laporan	4.148.000	-	-	7 Laporan	2.950.000	7 Laporan	18,44%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108 Laporan	89.760.240	36 Laporan	20.560.076	36 Laporan	35.384.000	9 Laporan	4.549.675	45 Laporan	25.109.751	45 Laporan	27,97%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	218.880.000	14 Laporan	97.328.208	12 Laporan	92.900.000	3 Laporan	19.865.800	17 Laporan	117.194.008	17 Laporan	53,54%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90 Persen	1.498.672.400	90 Persen	482.646.750	90%	991.350.400	30%	61.364.500	90 Persen	544.011.250	90 Persen	36,30%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	78 Unit	1.138.036.400	26 Unit	397.602.750	26 Unit	762.915.000	7 Unit	50.465.500	33 Unit	448.068.250	33 Unit	39,37%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	150.000.000	30 Unit	13.909.000	30 Unit	27.557.200	6 Unit	2.000.000	36 Unit	15.909.000	36 Unit	10,61%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	210.636.000	2 Unit	71.135.000	2 Unit	200.878.200	2 Unit	8.899.000	4 Unit	80.034.000	4 Unit	38,00%
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100 Persen	9.476.818.000	100 Persen	4.252.673.364	100%	4.161.774.000	30%	815.530.600	100 Persen	5.068.203.964	100 Persen	53,48%
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	8 operasi	9.121.520.000	3 operasi	4.024.098.364	3 operasi	3.881.788.800	3 operasi	786.545.600	3 operasi	4.810.643.964	3 operasi	52,74%

SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA S/D RENJA TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2025 YANG DIEVALUASI)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DI EVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	400.000.000	2 Dokumen	297.663.230	0	-	0	-	2 Dokumen	297.663.230	2 Dokumen	74,42%
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	165 laporan	8.411.520.000	102 laporan	3.726.435.134	55 laporan	3.796.248.800	18 laporan	786.545.600	120 laporan	4.512.980.734	120 laporan	53,65%
	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga yang terdampak Penegakan Perda dan Perkada	24 laporan	90.000.000	-	-	8 laporan	15.000.000	2 laporan	-	2 laporan	-	2 laporan	0,00%
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	3 unit	90.000.000	-	-	5 unit	70.540.000	-	-	-	-	-	0,00%
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 kasus	130.000.000	-	-			-	-	-	-	-	0,00%
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah operasi penegakan Perda	4 operasi	295.298.000	4 operasi	228.575.000	2 operasi	279.985.200	1 operasi	28.985.000	4 operasi	257.560.000	4 operasi	87,22%
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3 Laporan	60.000.000	-	-	1 Laporan	10.045.200	-	-	-	-	-	0,00%
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	20 Laporan	235.298.000	8 Laporan	228.575.000	8 Laporan	269.940.000	2 Laporan	28.985.000	10 Laporan	257.560.000	10 Laporan	109,46%

SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA S/D RENJA TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2025 YANG DIEVALUASI)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DI EVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	3 kegiatan	60.000.000	-	-	2 operasi	970.602.300	-	-	-	-	-	0,00%
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	4 Laporan	60.000.000	-	-	1 Laporan		-	-	-	-	-	0,00%
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah	10 Menit	4.158.341.200	4 Menit	1.084.454.286	10 Menit	970.602.300	4 Menit	99.963.200	4 Menit	1.184.417.486	4 Menit	28,48%
Meningkatnya cakupan pelayanan penanganan bahaya kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	11 kegiatan	3.801.341.200	1 kegiatan	1.028.429.136	2 kegiatan	773.182.800	1 kegiatan	99.963.200	1 kegiatan	1.128.392.336	1 kegiatan	29,68%
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	45 Laporan	3.416.341.200	12 Laporan	1.028.429.136	15 Laporan	682.052.800	4 Laporan	99.963.200	16 Laporan	1.128.392.336	16 Laporan	33,03%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	18 Unit	185.000.000	-	-	15 unit	91.130.000	-	-	-	-	-	0,00%
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	6 orang	100.000.000	-	-			-	-	-	-	-	0,00%
	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	80 keluarga	100.000.000	-	-			-	-	-	-	-	0,00%

SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA S/D RENJA TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2025 YANG DIEVALUASI)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DI EVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kegiatan pemberdayaan	3 kegiatan	205.000.000	1 kegiatan	49.586.100	2 kegiatan	105.239.500	-	-	1 kegiatan	49.586.100	1 kegiatan	24,19%
	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	100 orang	70.000.000	-	-	50 orang	60.008.000	-	-	-	-	-	0,00%
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	48 kelurahan	135.000.000	16 kelurahan	49.586.100	16 kelurahan	45.231.500	-	-	16 kelurahan	49.586.100	16 kelurahan	36,73%
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100 Persen	152.000.000	100 Persen	6.439.050	100%	92.180.000	25%	-	100 Persen	6.439.050	100 Persen	4,24%
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	36 Laporan	77.000.000	134 Laporan	6.439.050	12 Laporan	25.000.000	3 Laporan	-	137 Laporan	6.439.050	137 Laporan	8,36%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	5 unit	75.000.000	-	-	5 unit	67.180.000	-	-	-	-	-	0,00%
				29.364.777.780		11.932.322.299		11.973.657.998		2.606.147.309		14.538.469.608		49,51%

Berdasarkan tabel 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan ke I Tahun 2025, berikut analisis dari tabel tersebut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, beberapa kegiatan yang menunjang sasaran kinerja telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai anggaran kas. Terdapat beberapa sub kegiatan yang masih belum atau tidak dilaksanakan dikarenakan kegiatan ini dampak pengurangan anggaran atas difocusing.
2. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum, beberapa kegiatan yang menunjang sasaran kinerja telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai anggaran kas. Terdapat 3 sub kegiatan yang masih belum atau tidak dilaksanakan dikarenakan kegiatan ini kena dampak pengurangan anggaran atas difocusing.
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamata Kebakaran dan Penelamatan Non Kebakaran beberapa kegiatan yang menunjang sasaran kinerja telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai anggaran kas. Terdapat 3 sub kegiatan yang masih belum atau tidak dilaksanakan dikarenakan kegiatan ini kena dampak pengurangan anggaran atas difocusing

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seluruh program kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang untuk Tahun 2024-2026 (Berdasarkan Renstra 2024-2026) dicapai dengan sasaran yakni :

1. Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan pencegahan perda
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pemadam kebakaran

Sedangkan untuk tahun 2025 (Berdasarkan Renstra 2025-2029) dicapai dengan sasaran yakni :

1. Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum linmas) serta penegakan peraturan daerah (Perda).
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pemadam kebakaran
3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Target evaluasi capaian kinerja untuk 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat sebagaimana berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kota Padang Panjang s.d Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Renstra Perubahan 2018-2023										
1	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum				100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Penegakkan Perda				100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK				100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah				10 menit	3 menit	100%	10 menit	2 menit	100%
Renstra RPD 2024-2026										
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%						
2	Persentase Penegakkan Perda	100%	100%	100%						
3	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK	100%	100%	100%						
4	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah	10 menit	4 menit	100%						

Sumber:.. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Dari tabel 2.2 dapat dilihat capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam rentang 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2022 s/d 2024. Pada urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat terdapat beberapa indikator yang menggambarkan pelayanan terkait urusan tersebut. Diantaranya adalah indikator Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum dicapai melalui penanganan atas pengadun pelanggaran yang ditangani, dimana untuk Tahun 2020-2023 dapat diselesaikan sesuai dengan target, realisasi dan capaian kinerja 100% dari jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk. Begitu juga Tahun 2024 indikator urusan ketentraman dan ketertiban umum ada perubahan indikator kinerja berdasarkan Renstra PD 2022-2024 yaitu indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman

dan Ketertiban Umum dengan target, realisasi dan capaian kinerja 100%. Artinya seluruh pengaduan atau pelanggaran yang masuk dapat ditangani atau ditanggulangi 100% dari jumlah pelanggaran atau gangguan Trantibum yang terjadi. Hal ini menunjukkan efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam menanggulangi berbagai gangguan trantibum yang terjadi di daerah. Beberapa faktor yang mendukung capaian ini antara lain peningkatan kerjasama dengan instansi terkait, peningkatan patroli dan pengawasan, dan tokoh masyarakat membantu dalam pengumpulan informasi, penanganan kasus, serta sosialisasi peraturan daerah terkait trantibum serta penggunaan teknologi dalam penanganan kasus trantibum.

Hal ini beriringan dengan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan telah sesuai dengan target, realisasi dan capaian kinerja 100%. Artinya seluruh masyarakat kota Padang Panjang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada. Dari jumlah kejadian pelanggaran Perda dan Perkada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 semuanya terlayani sesuai target. Indikator ini merupakan pemenuhan SPM terkait bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Untuk indikator Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dari Tahun 2022 s/d 2024 sebesar 100% dari jumlah layanan pemadaman penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di Kota Padang Panjang dalam tingkat waktu tanggap oleh Satpol PP dan Damkar ditambah jumlah layanan pemadaman di Kota Padang Panjang dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan Satpol PP dan Damkar dari jumlah jumlah kejdian kebakaran di Kota Padang Panjang.

Untuk indikator waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran, yang ditargetkan 10 menit tercapai 3 menit dari rata-rata waktu tanggap penanganan kebakaran, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadam kebakaran dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

Dari indikator waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal berupa: layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi semuanya telaksana dengan baik

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bahaya kebakaran berdasarkan kebijakan yang ditetapkan.

1. Upaya-upaya yang dilakukan adalah melalui pembinaan, pengawasan, penertiban dan penindakan sehingga terwujud peningkatan kesadaran masyarakat untuk mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Dalam pencapaian suasana tentram dan tertib di masyarakat ada beberapa kendala antara lain :
 - a. Peran serta dan pemberdayaan masyarakat perlu dioptimalkan termasuk lembaga adat guna terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum.
 - b. Masih adanya pelanggaran di fasilitas umum dan fasilitas sosial terutama pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang bermobil, gepeng, anak jalanan, kelompok funk, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Pesatnya perkembangan pembangunan dan peningkatan penduduk di Kota Padang Panjang sudah barang tentu positif dan negatif termasuk berakibat kepada penyediaan perumahan, jaminan kelayakan berusaha yang menimbulkan dampak masalah sosial yang memungkinkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, apalagi seringnya berpindah – pindah tempat .
 - d. Fungsi pembinaan dan pemberdayagunaan masyarakat terutama lembaga-lembaga adat belum mendukung ketentraman dan ketertiban secara optimal.
 - e. Wilayah Kota Padang panjang yang termasuk kepada wilayah dengan kategori rawan bencana alam.

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya sumber daya manusia aparatur.
2. Masih belum mencukupi sarana dan prasarana.
3. Masih perlunya penambahan anggaran.

Permasalahan yang ada perlu ditindak lanjuti dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang sebelumnya responsive menjadi preventif, untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta pelayanan bahaya kebakaran. Adapun tantangan dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yaitu :

1. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia.
2. Belum adanya peta rawan bencana
3. Jumlah penduduk yang heterogen berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

Sedangkan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pemadam Kebakaran, yaitu :

1. Koordinasi yang baik antar instansi dimana dengan terjalinnya koordinasi yang baik antar dinas/badan/kantor/bagian di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

2. Pemanfaatan teknologi informasi.

Perkembangan teknologi informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.

3. Kerjasama dengan pihak luar.

Adanya kerjasama dengan pihak luar merupakan peluang yang sangat baik dalam rangka menjaga stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Padang Panjang.

4. Adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung tupoksi.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan sangat membantu sebagai dasar hukum penyelenggaraan kegiatan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemadam Kebakaran. Dalam pelaksanaannya terdapat isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian, isu-isu strategis yang mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat:

1. Penyempurnaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah harus menjadi perhatian khusus, karena Perda dan Perkada adalah landasan yang menjadi titik tolak Polisi Pamong Praja menentukan arah bertindak.;
2. Perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur Satuan Polisi Pamong Praja terutama PPNS dan peningkatan sumber daya manusia aparatur pemadam kebakaran di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dan Pemadam Kebakaran;
3. Letak geografis Kota Padang Panjang yang berada diperlintasan didukung dengan potensi wisata yang ada di Kota Padang Panjang meningkatkan geliat perekonomian masyarakat disertai bertambahnya jumlah pengunjung ke Kota Padang Panjang berbanding lurus dengan potensi pelanggaran Perda dan trantibum.
4. Perlindungan masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan..
5. Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), merupakan salah satu indikator pada standar pelayanan minimal. Kepadatan dan kerapatan rumah penduduk dapat memperlambat waktu tanggap layanan WMK, walaupun jarak tempuh tergolong dekat;

Dukungan peralatan pemadam kebakaran yang memadai dan memenuhi syarat akan sangat berpengaruh kepada tingkat keberhasilan upaya pemadaman dan sekaligus mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja bagi petugas pemadam kebakaran yang sedang bertugas dalam proses pemadaman.

Tabel 2.3
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, trantibum, dan perlindungan masyarakat	Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda	Kurangnya kualitas dan kuantitas personil Satpol PP dan satlinmas

			Kurangnya sarana dan prasarana Satpol PP
			Rendahnya pemahaman masyarakat tentang penegakan perda
			Kurangnya komitmen mitra kerja tentang trantibum
			Kurangnya komitmen penggagas perda
		Respon time yang masih tinggi	Jalan yang kecil dan sulit untuk di akses oleh kendaraan pemadam
			Padatnya perumahan
			Kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran & rescue
			Kurangnya keterampilan teknis personil pemadam kebakaran & rescue
			Masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dan instansi/lembaga tentang penanggulangan dan pencegahan kebakaran dan non kebakaran
			Belum optimalnya koordinasi antar lembaga/OPD

Sumber:.. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan pembangunan dijabarkan dan ditujukan dengan jelas pada sasaran yang dirumuskan secara spesifik untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dinamika dalam pembangunan daerah tidak hanya diperhatikan secara spasial, artinya tidak hanya memperhatikan dinamika di lingkup satu wilayah saja, melainkan juga dengan memperhatikan dinamika yang terjadi secara regional maupun nasional. Untuk itu dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah juga harus disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan nasional.

Kebijakan Nasional Satpol PP dan Damkar yang tertuang dalam Renstra 2025-2029 diarahkan untuk meningkatkan peran strategis kedua lembaga ini dalam mendukung ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Kebutuhan untuk merespons tantangan yang semakin kompleks, seperti peningkatan konflik sosial, urbanisasi, risiko bencana, dan tuntutan terhadap pelayanan publik yang lebih profesional dan humanis. Secara umum, kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), mendorong digitalisasi layanan, serta membangun sistem kolaboratif antara pusat dan daerah.

Namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran dan infrastruktur, terutama di daerah-daerah terpencil. Masih banyak satuan Satpol PP dan Damkar yang kekurangan personel terlatih serta minim peralatan standar. Selain itu, lemahnya koordinasi lintas sektor dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi kendala dalam mewujudkan sistem penanganan ketertiban dan kebencanaan yang efektif. Di sisi lain, kritik terhadap pendekatan Satpol PP yang cenderung represif dalam menangani

pelanggaran, seperti penertiban pedagang kaki lima, menunjukkan perlunya perubahan paradigma ke arah yang lebih humanis dan berbasis hak asasi manusia.

3.1.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam 2025-2029 dirancang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Ditetapkan visi Tahun 2025-2029 yaitu :

“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan delapan misi strategis sebagai arah pembangunan jangka menengah sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu visi ke 2 Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Kemudian faktor-faktor penghambat pelayanan perangkat daerah yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yaitu: kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur, belum

memadainya anggaran, sarana dan prasarana, masih kurangnya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran. Sedangkan faktor pendorongnya, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diakui secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

3.1.2. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029; telah ditetapkan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2025-2029 menjadi Visi, Misi, dan Program Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Visi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah :

“SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN”

Visi ini memuat tiga kata kunci utama yang menjadi dasar pijakan arah pembangunan lima tahun ke depan, yaitu Madani, Maju, dan Berkeadilan. Ketiga kata ini memiliki makna strategis dan nilai filosofis yang kuat sebagai refleksi dari identitas, potensi, dan harapan masyarakat Sumatera Barat di masa depan.

MADANI

Dalam konteks pembangunan “madani” mencerminkan masyarakat berperadaban tinggi, menjunjung nilai-nilai etika, moral, dan spiritual, serta menjaga harmoni sosial, hidup dalam keteraturan, menghargai hak dan kewajiban, dan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat.

Selain itu, madani juga mencerminkan bahwa masyarakat hidup dengan berbasiskan pada kearifan lokal, yakni masyarakat yang memelihara adat dan budaya Minangkabau yang berlandaskan filosofi “Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK)”.

Madani juga menunjukkan kondisi masyarakat yang maju secara sosial dan spiritual, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga keseimbangan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Dengan demikian, Sumatera Barat Madani adalah daerah yang menjadikan nilai-nilai keagamaan dan adat sebagai fondasi kehidupan sosial dan pemerintahan yang adil, beretika, dan bermartabat.

MAJU

Kata maju dalam visi ini dimaknai sebagai kondisi pembangunan daerah yang berdaya saing tinggi, baik dalam skala nasional maupun internasional melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, inovasi, dan infrastruktur. Maju juga menunjukkan konsep pembangunan yang berkelanjutan dimana pembangunan ekonomi dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat.

Maju juga mencerminkan modern namun tetap berakar pada nilai tradisional, yang berarti tidak meninggalkan identitas lokal dalam proses pembangunan. Sehingga kemajuan pembangunan diharapkan mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta kapasitas daya saing daerah di berbagai bidang strategis.

BERKEADILAN

Keadilan dalam konteks pembangunan tidak hanya bermakna persamaan formal, tetapi juga keadilan substantif yang mencakup terjadinya **Pemerataan hasil pembangunan** antar wilayah, antar kelompok sosial, dan antar sektor, sehingga tidak ada daerah atau kelompok masyarakat yang tertinggal, terjadinya **Kesempatan yang setara** dalam mengakses pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta terwujudnya **Pemberdayaan kelompok rentan**, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Berkeadilan juga mencerminkan semangat inklusivitas dan keberpihakan terhadap kelompok marjinal, serta pengambilan kebijakan berbasis data dan prinsip *no one left behind*.

Sedangkan Misi pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- 1) Misi 1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas
- 2) Misi 2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan
- 3) Misi 3. Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan
- 4) Misi 4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat
- 5) Misi 5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana
- 6) Misi 6. Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas

- 7) Misi 7. Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM
- 8) Misi 8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif

Berdasarkan visi dan misi diatas, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang yang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketertiban berdasarkan visi dan misi diatas, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang yang mempunyai tugas pokok yaitu membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat akan melaksanakan **misi keenam**, yaitu: ***Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas***. Dengan tujuan, yaitu: Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas. Selanjutnya sasarannya yaitu: Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas.

Sehubungan hal diatas, maka pelayanan perangkat daerah yang terkait yaitu upaya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menyelenggarakan perlindungan masyarakat, pembinaan pemadamaan kebakaran, pemenuhan standar pelayanan minimal urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta tata pemerintahan yang baik dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Faktor-faktor penghambat pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu: kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur, masih kurangnya kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta masih terjadinya pelanggaran norma agama, adat dan budaya kemudian adanya potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, kurangnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat serta penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran di tingkat kabupaten/kota belum terpenuhi. Sedangkan faktor pendorongnya, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang diakui secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi membantu Walikota melaksanakan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Tujuan pelayanan yang ditetapkan oleh pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam Renstra Tahun 2025-2029 adalah mengacu pada tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029.

Penjabaran tujuan dan sasaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: ***“meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum”***.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih, maka dirumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis, yang menunjukkan hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah terpilih selama kurun waktu lima tahun kedepan. Tujuan dan sasaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda.
- b. Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sasarannya ***“Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah”***.

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran serta indikator masing-masing sasaran dan target kinerja tahunan dapat dijelaskan melalui Tabel berikut.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang
Tahun 2025

No.	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Renstra 2025	Target Renja Perubahan 2025
1	NSPK tentang Satpol PP (PP No.16 Tahun 2018 dan tentang SPM PP No.2 Tahun 2018 dan Permendagri No.114 Tahun 2018	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase penurunan pelanggaran Perda	2,5%	2,5%
			1. Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda	Persentase Penyelenggaraan Tratibumlinmas	100%	100%
2	Sasaran 4.1 RPJMD : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		2. Meningkatnya kualitas pelayanan pemadam kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan WMK	100%	100%
			3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	65,30	65,30

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Program adalah instrumen kebijakan dari beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

a. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan:

- Pencapaian visi misi kepala daerah apabila dikaitkan dengan visi dan misi Walikota Padang Panjang, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menjadi Perangkat Daerah pendukung dalam pencapaian misi 4 *“Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Panjang yang Rukun, Aman, Berbudaya dan berkarakter Berbasis Nilai Agama, Adat Istiadat”* Tujuan ke 4 yaitu *“Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat”* dan Sasaran ke 13 yaitu *“Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum”* dari RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang berperan untuk meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong

Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi dengan strategi peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Arah kebijakan yang ditentukan Gerakan Sadar dan Taat Aturan dengan indikator kinerja sasaran Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan meliputi :

1. Jumlah Program dan kegiatan :

Adapun jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebanyak 3 program dan sebanyak 10 kegiatan serta 19 sub kegiatan.

2. Penyebaran lokasi program dan kegiatan :

Semua program dan kegiatan tersebut berada dilingkungan wilayah Kota Padang Panjang

3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif menurut sumber pendanaannya (APBD/APBN)

b. Penjelasan jika rumusan program kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 awal yang meliputi 3 (Tiga) program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 19 (Sembilan belas) sub kegiatan, adalah sebagai berikut :

Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan sebab :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
 - a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 - 2) Penyediaan Layanan Dasar dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - 1) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - b. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
 - 1) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berkenaan dalam

hal ini terkait realisasi dan capaian pada triwulan I, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan diperkirakan akan berpengaruh terhadap realisasi target pelaksanaan program/kegiatan dan berakibat terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran. .

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah pada Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN								12.202.093.398	12.367.084.245	11.484.539.832						8.921.977.195	SATPOL PP	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								12.202.093.398	12.367.084.245	11.484.539.832						8.921.977.195	SATPOL PP	
	1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								12.202.093.398	12.367.084.245	11.484.539.832						8.921.977.195	SATPOL PP	
51	1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	%	100		100	100	100	6.841.281.698	7.461.124.345	6.585.717.232						5.764.488.195	SATPOL PP	
	1.05.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100		100	90	100	5.333.431.498	6.029.567.805	5.839.973.852			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis	ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.714.389.175	SATPOL PP	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	4128		688	574	688	5.333.431.498	6.029.567.805	5.839.973.852	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis		4.714.389.175	SATPOL PP	
	1.05.01.2.05.	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	%	100		100	0	0			-			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis	-	30.750.000	SATPOL PP	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikator (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatorif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	852		221	174	0			-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis		30.750.000	SATPOL PP	
	1.05.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	%	100		100	90	100	242.195.200	280.704.740	142.716.340			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	223.356.650	SATPOL PP	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24		4	1	4	3.162.000	2.715.400	4.287.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis		3.356.650	SATPOL PP	
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24		4	12	4	23.966.700	14.739.340	23.828.940	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis		40.000.000	SATPOL PP	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	25		5	5	5	15.079.500	15.007.000	14.769.660	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis		15.000.000	SATPOL PP	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	144		24	15	24	199.987.000	248.243.000	99.830.440	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis		165.000.000	SATPOL PP	
	1.05.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	%	100		100	90	100	141.872.600	149.349.600	35.593.900			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	40.000.000	SATPOL PP	
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	32		0	2	4	141.872.600	149.349.600	35.593.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis		40.000.000	SATPOL PP	
	1.05.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	%	100		100	90	100	132.432.000	136.655.200	119.102.140			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	98.516.800	SATPOL PP	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	72		12	12	12	4.148.000	3.880.000	1.843.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis		5.000.000	SATPOL PP	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	216		36	36	35.384.000	35.384.000	19.867.240	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis		0,00	SATPOL PP		
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72		12	12	92.900.000	97.391.200	97.391.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis		93.516.800	SATPOL PP		
	1.05.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	%	100		100	90	100	991.350.400	864.847.000	515.911.400			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	657.475.570	SATPOL PP	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	156		26	26		864.847.000	448.331.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis		587.263.570	SATPOL PP		
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	180		30	30	30	27.557.200	29.252.800	16.508.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis		0,00	SATPOL PP	
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10		1	2	1	200.878.200	48.160.000	51.072.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis		70.212.000	SATPOL PP	
54	1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	100		100	100	100	4.161.774.000	3.888.261.100	3.977.263.900						3.006.489.000	SATPOL PP	
			Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	80		74	0	75										SATPOL PP	
			Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	70		0	0	0										SATPOL PP	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
	1.05.02.2.01.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum	Operasi	35		2	3	2	3.881.788.800	3.670.296.300	3.643.226.400			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis	Bidang Trantibum dan Penegakkan Perda		2.873.840.000	SATPOL PP
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	330		102	55	55	3.796.248.800	3.605.527.400	3.639.726.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis			2.803.840.000	SATPOL PP
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	18		8	8	8	15.000.000	5.432.400	3.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis			30.000.000	SATPOL PP
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	52		0	5	0	70.540.000	59.336.500	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis			40.000.000	SATPOL PP
	1.05.02.2.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Operasi Penegakan Perda	Operasi	17		1	1	2	279.985.200	217.964.800	334.037.500			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis	Masyarakat dan/atau objek pelanggar Perda dan Perkada		132.649.000	SATPOL PP

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	5		0	1	0	10.045.200	27.504.800	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis		25.000.000	SATPOL PP	
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	34		8	8	2	269.940.000	190.460.000	334.037.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis		107.649.000	SATPOL PP	
55	1.05.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NO KEBAKARAN	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	100		0	0	10	970.602.30	940.286.000	853.978.300						151.000.000	SATPOL PP	
			Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100		0	0	100										SATPOL PP	
	1.05.04.2.01.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis kegiatan Pencegahan Pengendalian Pemadaman Kebakaran	Jenis Kegiatan	26		1	2	2	773.182.800	789.346.600	799.524.700			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis	Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat	80.000.000	SATPOL PP	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	75		12	15	15	682.052.800	537.876.600	520.349.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis		0,00	SATPOL PP	
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	13		0	0	0				- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis		40.000.000	SATPOL PP	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	36		0	15	4	91.130.000	251.470.000	279.175.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis		40.000.000	SATPOL PP	
	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Keluarga	58		0	0	0			-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis		0,00	SATPOL PP	
	1.05.04.2.04.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan	11		0	2	1	105.239.500	66.515.150	40.832.100			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis	Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat	45.000.000	SATPOL PP	
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	250		0	50	0	60.008.000	25.728.350	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis		0,00	SATPOL PP	
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Kelurahan	16		0	16	16	45.231.500	40.786.800	40.832.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis		45.000.000	SATPOL PP	
	1.05.04.2.05.	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Persen	100		100	100	100	92.180.000	84.424.250	13.621.500			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis	Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat	26.000.000	SATPOL PP	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	72		134	12	12	25.000.000	17.740.000	5.259.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis		0,00	SATPOL PP	
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	42		0	5	1	67.180.000	66.684.250	8.362.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis		26.000.000	SATPOL PP	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan dokumen penting dalam rangka mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat. Penyusunan Renja seharusnya mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Semua itu akhirnya menuju pada proses menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya berkaitan langsung kepada masyarakat, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2025. Perencanaan program dan kegiatan tersebut memperhatikan dan menganalisis isu-isu penting dalam pembangunan yang patut ditindaklanjuti. Selanjutnya, penyusunan program dan kegiatan pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator dan target kinerja serta pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam RKPD Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2025. Ketersediaan anggaran sesuai dengan pagu indikatif memerlukan komitmen semua pihak yang terkait dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran sehingga program dan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Namun hal ini bukan suatu kemutlakan, tentunya disesuaikan pula dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah serta ketersediaan dana.

Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 yang dilengkapi dengan indikator serta target pencapaian kinerja akan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang selama tahun 2025. Terlaksananya Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sesuai dengan indikator dan target pencapaian kinerja tergantung kepada koordinasi dan komitmen seluruh pihak terkait pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, Juni 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG**


BENNY SSTP
Pembina Tk II/ NIP. 19840402 20021